

DAFTAR PUSTAKA

- Aini. R.N., 2016. “Analisis Kecenderungan Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bantul).” *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Aman, A. dan Kasimin, H., 2011. “E-procurement implementation: a case of Malaysia government.” *Transforming Government: People, Process and Policy*, Vol. 5 Iss 4 pp. 330 – 344.
- Anggoro, R., 2014. “Evaluasi Faktor Penghambat Proses Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Procurement*: Studi Pada Sekretariat Jenderal KESDM.” *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Arifah, D.A., 2012. “Praktek Teori Agensi Pada Entitas Publik dan Non Publik.” *Jurnal Prestasi*. Vol. 9, No. 1 (Juni): 85—95.
- Bahagia, S.N., 2011. “Sistem Pengadaan Publik dan Cakupannya.” *Jurnal LKPP: Senarai*, Vol. 1, No. 1 (Desember): 8--25.
- Bawono. I., 2011. “Evaluasi Atas Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Di Lingkungan Kementerian Keuangan.” *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Creswell, J.W., 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Approaches*. California: SAGE Publications.
- Halim, A., 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., ed. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hennink, M., Hutter, I., Bailey, A., 2011. *Qualitative Research Methods*. London: SAGE Publications.
- Iskandar, A.I., 2013. “Analisis Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Bogor, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).” *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Jensen, M.C. dan Meckling, W.H., 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behavior: Agency Costs and Ownership Structure.” *Journal of Financial Economics*. V. 3, No. 4 (Oktober):305—360.

- Kementerian Keuangan, 2013. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146/KM.1/2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Daerah di Lingkungan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan, 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
- Kementerian Keuangan, 2015. *Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya*. Jakarta: BLP.
- Kementerian PAN RB., 2012. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya.
- Kuncoro, A., 2013. *Begini Tender Yang Benar*. Yogyakarta: CV. Primaprint.
- LKPP, 2012. Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.
- LKPP, 2015. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*.
- LKPP dan MCA-I, 2016. *Naskah Akademis: Kajian Pengembangan Organisasi Pengadaan Kementerian Keuangan*.
- Madyaningsih, 2015. "Evaluasi dan Strategi Peningkatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta." *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Majalah Treasury Indonesia, 2016. "Mewujudkan Belanja Berkualitas, Bukan Hanya Tanggung Jawab TEPR." Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi IV. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Munandar, M., 2001. *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Edisi 1, Cetakan 14. Yogyakarta: BPFE.
- Murray, J.G., 2009. "Public procurement strategy for accelerating the economic recovery." *Supply Chain Management: An International Journal*, Vol. 14 Iss 6 pp. 429 – 434.
- Ngadisah, 2004. *Buku Materi Pokok Birokrasi, Modul 1: Pengertian dan Teori-Teori Klasik Birokrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Nordiawan, D., 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia, 2010. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Republik Indonesia, 2015. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2015. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Rizal, S., 2016. "Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Atas Terjadinya Pelelangan Gagal Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Yogyakarta." *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Rolfstam, M., Phillips, W., dan Bakker, E., 2011. "Public procurement of innovations, diffusion and endogenous institutions." *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 24 Iss 5 pp. 452 – 468.
- Santoso, H., 2016. "Analisis Hambatan Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2015 Satuan Kerja Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten." *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Schiavo-Campo, S. dan Tommasi D., 1999. *Managing Government Expenditure*. ADB.
- Siswanto, A.D. dan Rahayu, S.L., 2010. "Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010." *Policy Paper*.
- Solikhin, 2014. "Evaluasi Penumpukan Pencairan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Akhir Tahun Anggaran pada Satuan Kerja." *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Sopian, A., 2014. *Dasar-Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: IN MEDIA.

Sukadi, 2012. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja pada Akhir Tahun Anggaran: Studi pada Satuan Kerja Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.” *Tesis*. Universitas Gadjah Mada.

Yin, R. K., diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir. 2014. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.